

**PERANAN LURAH DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN WALA-WALAYA
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**



Oleh :

SAHRIL

4597021005/9971110510005

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi*

PADA

**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2001

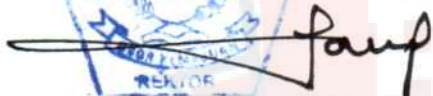
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2002

Judul Skripsi : **Peranan Lurah dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar**
Nama : **SAHRIL**
Nomor Pokok : **45 97 021 005**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) dalam Jurusan Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Negara.

PENGAWAS UMUM

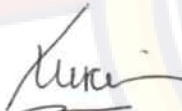


Dr. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA
Rektor Universitas "45"

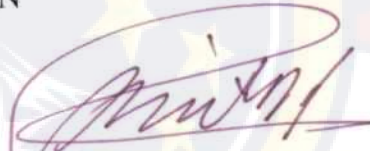


Dr. S. HUSAIN HAMKA, MS
Dekan Fisipol Univ. "45"

PANITIA UJIAN



Dra. NURMI NONCI, M.Si
Ketua



Drs. MARTEN D. PALOBO'
Sekretaris

TIM PENGUJI

Drs. HUSAIN HAMKA, MS



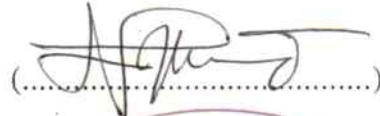
(.....)

Drs. H.A.R. TAHIR, MS



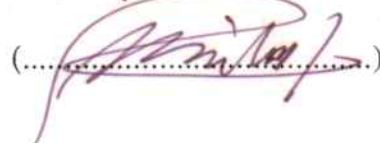
(.....)

Dra. NURKAIDAH, MM



(.....)

Drs. MARTEN D. PALOBO'



(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Makassar, yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SAHRIL**
Nomor Pokok : **45 97 021 005**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Lurah dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar**

Disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 19 Januari 2002 setelah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. HUSAIN HAMKA, MS


Drs. MARTEN D. PALOBO

Mengesahkan,

Dekan Fisipol Universitas "45"

Ketua Jurusan :
Ilmu Administrasi


Drs. HUSAIN HAMKA, MS


Drs. MARTEN D. PALOBO

KATA PENGANTAR

Sebagai hamba Allah Subhanahu Wata'ala, maka sepatutnyalah mengucapkan syukur kehadirat-Nya atas limpahan rahmat dan karunianya atas diri penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Penulisan skripsi ini adalah dengan dasar pertimbangan ilmiah sebagai realita dari acuan pikiran penulis selama menempah diri di bangku kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Disadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan di sana sini, oleh karena itu dengan penuh lapang dada akan menerima semua bentuk kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Hadirnya skripsi ini adalah berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada yang terhormat :

1. DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar
3. Bapak Drs. Marten D. Paiobo' selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas "45" Makassar
4. Bapak Drs. Husain Hamka, MS dan Bapak Drs. Marten D. Palobo sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan memberikan petunjuk sampai selesainya skripsi ini.

5. Bapak Kepala Kelurahan Wala-Walaya Kota Makassar beserta seluruh Pegawai yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengumpulan data-data yang sehubungan dengan kebutuhan skripsi ini.
6. Bapak Dosen/Ibu Dosen dan staf Administrasi yang telah mendidik, membina, memberi arahan dan petunjuk serta pelayanan yang prima selama di bangku kuliah sampai selesai.
7. Sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda Abd. Majid dan Ibunda Saenab yang tak henti-hentinya mendidik, membesarkan, mendoakan, memberi dorongan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
8. Semua Keluarga dan teman-teman kerabat di kampus yang telah membantu selama di bangku kuliah.

Atas bantuan dan dorongan di atas penulis tidak sanggup untuk membalasnya kecuali memohonkan doa kepada Allah SWT untuk memberikan pahala yang setimpal dengan alam perbuatan mereka, Insya Allah. Semoga skripsi ini dapat berguna dari diri penulis, almamater, bangsa dan negara. Amin.

Makassar, Januari 2002

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembahasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lurah	12
B. Pengertian Kepemimpinan dan Partisipasi	13
C. Peranan Kepala Kelurahan dalam Pembangunan	30
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	37
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Wala- Walaya.....	42
B. Keadaan Geografi	43

C. Keadaan Demografi	45
D. Tugas-Tugas Pokok Kelurahan Wala-Walaya	50
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Wala-Walaya Tahun 2001.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepala Kelurahan Wala-Walaya dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.....	57
B. Hasil-hasil Pemanfaatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	61
C. Faktor Penunjang dan Penghambat Partisipasi Masyarakat	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

NOMOR	TEKS	HALAMAN
1.	Luas Wilayah Kelurahan Wala-Walaya Berdasarkan Jumlah Lingkungan	44
2.	Keadaan Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Umur Tahun 2001	46
3.	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian pada Kantor Kelurahan Wala-Walaya Kota Makassar	47
4.	Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Wala-Walaya	48
5.	Keadaan Pemeluk Agama di Kelurahan Wala-Walaya Kota Makassar.....	48
6.	Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Wala-Walaya Kota Makassar	49
7.	Tanggapan Responden Tentang Cara Pendekatan Kepala Kelurahan dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat	58
8.	Tanggapan Responden tentang Peranan Kepala Kelurahan sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	59
9.	Tanggapan Responden Tentang Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Lingkungan	62
10.	Tanggapan Responden tentang Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Jalan	63
11.	Tanggapan Responden tentang Kepala Keluarga yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Masjid	65
12.	Tanggapan Responden tentang Kegairahan Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	66
13.	Tanggapan Responden tentang Faktor-faktor yang Menunjang Lajunya Pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya	69
14.	Tanggapan Responden tentang Faktor-faktor yang Menghambat Lajunya Pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk cita-cita itu diperlukan pembangunan yang menyeluruh baik di bidang politik, perekonomian, Pendidikan, sosial dan lainnya termasuk pembangunan desa/Kelurahan.

Dalam garis-garis besar Haluan negara diamanatkan bahwa perhatian yang sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan/Kelurahan terutama melalui peningkatan swadaya masyarakat serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Oleh karena itu pembangunan pedesaan atau Kelurahan merupakan bagian vital dari pembangunan nasional yang tidak bisa terpisahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya melaksanakan pembangunan di Kelurahan, maka salah satu faktor yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ditingkat Kelurahan

adalah kepemimpinan yang dijalankan kepala Kelurahan itu sendiri. Hal ini dimungkinkan oleh karena Kepala Kelurahan merupakan penguasa tertinggi bidang pemerintahan ditingkat Kelurahan, ini tentu memiliki pengaruh yang cukup strategis dalam menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan. Jadi jelas bahwa kegiatan pembangunan di tingkat Kelurahan sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan Kepala Kelurahan, karena bagaimanapun juga bentuk pembangunan atau kegiatan selalu memerlukan kepemimpinan.

Sejarah telah mencatat bahwa masalah kepemimpinan sepanjang zaman merupakan persoalan yang penting bagi umat manusia. Kelangsungan hidup atau timbul tenggelamnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin saat itu.

Dalam dunia modern dewasa ini peranan pemimpin sangat diperlukan terutama dalam kiprahnya sebagai penggerak kemajuan masyarakat atau bangsa kearah yang lebih baik. Maka menggerakkan kemajuan masyarakat atau bangsa kearah yang lebih baik. Maka menggerakkan kemajuan masyarakat terutama dalam hal peningkatan peran lurah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan masyarakat kota yang pola kehidupannya serba kepepet dan sibuk

dengan usaha-usaha memenuhi kebutuhannya yang selalu mendesak. Apakah dengan adanya kondisi semacam ini masih sempat berpartisipasi secara sukarela melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam memacu kehidupan yang lebih baik.

B. Pembahasan dan Rumusan Masalah

Dewasa ini pemerintah dan rakyat Indonesia semakin giat melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan berbagai prioritas, melalui proyek-proyek tertentu baik proyek sektoral, proyek regional maupun proyek Inpres.

Hal ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk mendukung lancarnya pembangunan Nasional itu sendiri. Dengan demikian maka pemerintahan telah menetapkan berbagai kebijaksanaan dengan cara yang lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dewasa ini, yang makin digalakkan di seluruh pelosok tanah air. Rangkaian kebijaksanaan ditetapkan oleh pemerintah pada setiap Repelita tampaknya telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan/Kelurahan yang tidak habis-habisnya mendambakan kehidupan yang lebih baik, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Meskipun pemerintah dengan bermacam-macam bentuk kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dijalankan demi tercapainya suatu kehidupan yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia, namun dibalik langkah-langkah tersebut nyata masih sering terjadi kesimpangsiuran dalam merealisasikannya. Ini disebabkan karena kurangnya komunikasi social antara pemerintah dan masyarakat di daerah pedesaan/Kelurahan yang sebenarnya menjadi sasaran utama pembangunan.

Demikian pula halnya di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo, dimana pemerintah setempat telah menata kehidupan rumah tangganya sedemikian rupa melalui program pembangunan dengan menitik beratkan pembangunan di wilayah pedesaan/Kelurahan namun masih merupakan tanda Tanya di sini, apakah masyarakat bersedia menerima dengan baik setiap program pemerintah sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dan lebih giat lagi pada masa yang akan datang.

Dalam hubungan inilah maka yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah peranan Kepala Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan Kelurahan tersebut.

Berbicara mengenai peranan lurah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/Kelurahan dalam

pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan, maka dapat dijelaskan pengertian-pengertian tersebut antara lain sebagai berikut :

Peranan disini adalah fungsi yang penting dan fungsi tidak lain dari pada pembagian tugas dalam rangkaian organisasi.

Partisipasi adalah terlihatnya dan ikut serta masyarakat dalam mengambil bagian dalam suatu kegiatan pembangunan tanpa dipaksa. Peranan Kepala Kelurahan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan masalah yang luas dan kompleks, sementara keterbatasan dalam berbagai hal baik waktu, biaya dan tenaga merupakan hambatan tersendiri, sehingga di penulisan skripsi ini perlu dibatasi agar pembahasan mempunyai arah sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Mengenai pembatasan dan rumusan masalah yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Kepala kelurahan Wala-walaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan tersebut ?
- b. Bagaimana hasil-hasil program pembangunan di Kelurahan Wala-walaya ?

- c. Faktor-faktor apakah yang menunjang dan menghambat pembangunan di Kelurahan Wala-walaya ?

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Wala-walaya dapat dibandingkan dengan besarnya jumlah dana yang diperuntukkan bagi pembangunan tersebut, yaitu dengan melihat hasil-hasil pembangunan yang dapat menjadi ukuran besarnya tingkat partisipasi masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala Kelurahan Wala-walaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan tersebut
- b. Untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan yang memanfaatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Wala-walaya.
- c. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada yang berminat melanjutkan penelitian semacam ini.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kelurahan Wala-walaya dan pemerintah desa/kelurahan lainnya dalam rangka Menumbuhkan partisipasi masyarakat di Kelurahan tersebut.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan kelurahan/desa menjadi perhatian pemerintah, oleh karena sebagian besar penduduk berada di pedesaan, untuk melakukan kegiatan pemerintah tersebut. Maka hal ini tidak terlepas dari berbagai pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk suksesnya pembangunan kelurahan/desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

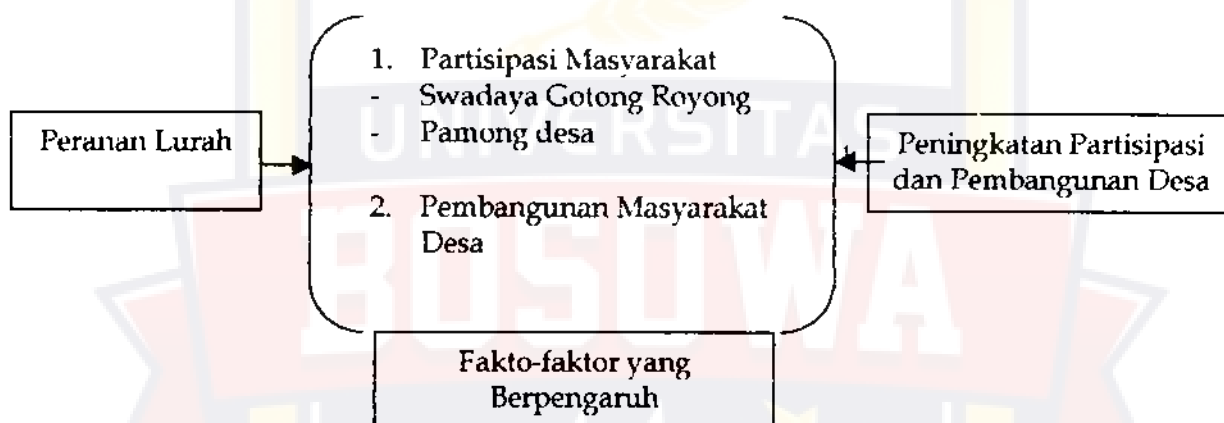
Berkaitan dengan hal tersebut maka Drs. Ibu Syamsi (1986 : 27) mengungkapkan bahwa :

" Pembangunan suatu negara menjadi tanggung jawab pemerintahan dan seluruh masyarakat dan negara pemerintah mempunyai kewajiban pembimbing".

Dengan demikian Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan umum di daerahnya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya harus melaksanakan berbagai tugas yang meliputi

bidang ketentraman dan ketertiban politik. Koordinasi dalam tugas instansi dan urusan rumah tangga daerah. Demikian pula pelaksanaan tugas khususnya yang menyangkut pembinaan masyarakat desa serta tugas-tugas keagrarisannya.

Dengan berdasarkan pada uraian di atas maka secara operasional penulis menunjukkan bahwa skema kerangka konsep sebagai berikut :



E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan yaitu dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan panduan wawancara. Sedangkan survey dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi. Olehnya itu

pengambilan sampel dari individu atau kelompok merupakan persoalan penting dalam pengumpulan data.

2. *Populasi dan Sampel*

a. Populasi adalah keseluruhan Kepala Keluarga yang diteliti di Kelurahan Wala-walaya yang terdiri dari 1803 Kepala keluarga.

b. Sampel

Yang dimaksud sampel adalah jumlah responden yang mewakili jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 1803, sedangkan dalam menentukan responden, peneliti menggunakan tehnik purposive samling yaitu penelitian menentukan orang-orang tertarik yang menjadi responden. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- Kepala lingkungan	2 orang
- Tokoh pendidik	20 orang
- Tokoh Agama	20 orang
- Tokoh masyarakat	8 orang
J u m l a h	50 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu tehnik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang menunjukkan permasalahan sehubungan dengan pembahasan seminar proposal ini.
- b. Interview yaitu merupakan suatu tehnik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
- c. Angket yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan daftar pernyataan dan di jawab oleh responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang hanya memberikan gambaran dari suatu penelitian dengan tidak menggantungkan diri pada angka-angka statistik.

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang hanya memberikan gambaran dari suatu penelitian dengan tidak menggantungkan diri pada angka-angka statistic.

F. Sistimatika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang sistimatikanya dapat dilihat sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistimatika Pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka yang meliputi Pengertian Peranan Lurah, Pengertian Kepemimpinan dan Partisipasi, Peranan Lurah dalam pembangunan, Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

Bab ketiga dikemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari : Geografik, Demografi, Tugas-tugas Pokok Pemerintahan Kelurahan Wala-walaya, Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Wala-walaya.

Bab keempat Hasil Penelitian dan pembahasan terdiri dari : upaya Kepala kelurahan Wala-walaya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hasil-hasil pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, faktor penunjang dan penghambat partisipasi masyarakat.

Bab kelima kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lurah

Maka dalam uraian ini, akan di bahas sebagai berikut :

1. *Pengertian Lurah*

Apabila didasarkan pada tugas yang dibebankan pada lurah, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan lurah adalah "seorang yang disertai tugas untuk memimpin, dan menyelenggarakan pemerintahan pada suatu wilayah tertentu" dan selanjutnya menurut C.S.T. Kansil, 1976 : 9 memberikan batasan pengertian tentang lurah sebagai berikut :

"Lurah adalah penyelenggara dan Penanggung jawab dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. *Peranan*

Adapun defenisi yang dapat dikemukakan sebagai pengertian peranan adalah fungsi penting dan fungsi itu adalah tidak lain dari pada pembagian tugas dalam rangkaian organisasi" (E.Utrech, 1979 : 20).

B. Pengertian Kepemimpinan dan Partisipasi

1. Kepemimpinan

Sebelum memasuki pengertian dari pada kepemimpinan maka penulis terlebih dahulu mengemukakan apa arti pemimpin sebagai kata dasar dari kepemimpinan.

Pemimpin mempunyai macam-macam pengertian antara lain :

“Seseorang pribadi kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”.
(Kartini Kartono, 1998 : 33)

Dengan pengertian tersebut di atas jelaslah pemimpin merupakan orang yang melaksanakan kepemimpinan karena adanya kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan yang dimilikinya itu antara lain pendidikan yang lebih tinggi keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, pengalaman yang lebih luas dan lain-lain. Dengan kelebihan yang dimilikinya maka ia diakui dan didukung oleh masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama.

Dengan pengertian pemimpin tersebut sehingga kita mengenal pemimpin formal dan informal. Adapun istilah itu sebagai berikut :

“Pemimpin formal yaitu seorang yang secara resmi diangkat

“Pemimpin formal yaitu seorang yang secara resmi diangkat dalam jabatan pemimpin, teratur dalam jabatan kepemimpinan, teratur dalam organisasi secara hirarki, biasanya apalagi dalam zaman pembangunan ini, tergambar dalam suatu gambar bagan yang tergantung dalam tiap-tiap kantor, kepemimpinan yang formil ini lazimnya tidak dengan sendirinya dapat memberi jaminan bahwa seseorang yang diangkat menjadi Pimpinan formil dalam organisasi sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Hal ini masih harus diuji dalam praktek. Pemimpin formil ini lazimnya dikenal sebagai “kepala”.

Sedangkan informal tidak mempunyai dasar pengangkatan yang resmi tidak nyata terlihat dalam hirarki organisasi, juga tidak terlihat gambar bagan, pemimpin dengan spontan di terima oleh kelompoknya karena memiliki sifat-sifat yang unggul” (M. Karjadi, 1981 : 6-7).

Dengan pengertian tersebut di atas maka nampaklah perbedaan antara pemimpin formal dan pemimpin informal yaitu :

- a. Pimpinan formal mempunyai organisasi tersusun rapi, sedangkan pemimpin informal organisasinya tidak seperti pemimpin formil.
- b. Pemimpin formil dengan jelas terlihat hirarki dalam organisasi, sedangkan pemimpin informal hirarki tidak nampak.
- c. Pemimpin formil mempunyai pengangkatan resmi, sedangkan pemimpin informal tidak mempunyai pengangkatan secara resmi.

Setelah secara singkat memahami apa itu pemimpin maka selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa arti kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat pemimpin, serta sifat pemimpin dan lain-lain.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam M. Karjadi, (1981 : 3) menjelaskan bahwa :

“Kepemimpinan adalah memproduksi dan memancarkan pengaruh terhadap kelompok orang-orang tertentu sehingga mereka bersedia (*willing*) untuk merubah pikiran, pandangan, sikap kepercayaan dan sebagainya dalam suatu organisasi formal maka kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang terus-menerus, yang membuat semua anggota organisasi bergiat dan berdaya upaya untuk memahami dan mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh pemimpin”.

Dikatakannya kepemimpinan adalah satu cara, dimana pemimpin dapat mempengaruhi, mendorong dan mengajak orang-orang agar perbuatannya dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengajak secara persuasif agar hal-hal yang kurang mendukung tujuan-tujuan tersebut dapat dihilangkan atau dengan kata lain dihindari dengan kesadaran yang tinggi.

Lebih lanjut Koentjoroningrat mendefinisikan kepemimpinan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, 1970 : 178 bahwa :

“Kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sesuai yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut”.

Menurut pendapat Koentjoroningrat ini, seorang pemimpin harus mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya agar mereka berbuat sesuai yang dikehendaki pemimpinnya.

Lebih lanjut Prof. DR. S.P. Siagian, 1985 : 24 dalam bukunya Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi, dikatakan sebagai berikut :

“Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi prilaku orang lain terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui prilaku yang positif yang memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi”.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa :

- a. Kepemimpinan itu mengarah kepada kemampuan individu yakni kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu.

- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan.

Nampak terlihat bahwa hakekat dari kepemimpinan itu adalah kemampuan dan kesanggupan seseorang individu untuk mempengaruhi orang lain.

Kemampuan dalam mempengaruhi orang lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor pribadi yaitu yang berkaitan erat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain, kejujuran, kecerdasan, kesabaran, ketabahan, keberanian percaya diri sendiri dan lain-lain.
- b. Faktor interaksi yaitu seseorang pemimpin akan mempunyai pengaruh dalam masyarakat apabila pemimpin itu mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Sebaliknya pemimpin yang tidak mempunyai hubungan baik dengan masyarakat, maka pemimpin yang demikian itu akan dibenci oleh masyarakat sehingga tidak banyak mempunyai pengaruh lagi.
- c. Faktor organisasi yaitu suatu sumber pengaruh yang hanya terdapat dalam organisasi saja, dimana seorang pemimpin

mempunyai pengaruh karena adanya jabatan atau kedudukan dalam organisasi. Akan tetapi masyarakat yang tidak memiliki organisasi formal maka sumber pengaruh yang demikian itu tidak ada. Dengan demikian sumber pengaruh dalam masyarakat, ditentukan oleh keberhasilan seorang pemimpin dalam membina kerja sama yang baik dengan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya sumber pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin, maka akan mampu mempengaruhi tingkah laku itu sendiri mencakup perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Munculnya seseorang dalam menduduki suatu

kepemimpinan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Teori Genetis
2. Teori Sosial
3. Teori Ekologis (Kartini Kartono, 1988 : 29)

ad.1. Teori genetis mengatakan bahwa :

- a. Pemimpin itu tidak dibuat, tetapi lahir melalui bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir.
- b. Dia ditakdirkan lahir sebagai pemimpin, dalam situasi kondisi bagaimanapun juga
- c. Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan deterministitis dan fasilitas.

ad.2. Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk tidak terlahirkan begitu saja.
- b. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan pendidikan.

ad.3. Teori ekologis atau synthesis (muncul sebagai reaksi kedua tersebut lebih dahulu), menyatakan sebagai berikut :

Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat ini dapat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa antara teori keturunan dikatakan tidak semua orang mampu menjadi pemimpin, hanya mereka yang mempunyai bakat yang dibawah sejak lahir. Sedangkan teori lingkungan mengatakan bahwa semua orang mampu menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan dan pendidikan yang cukup.

Kalau diamati kedua teori tersebut maka masing-masing mempunyai kelemahan karena sekalipun orang itu mempunyai bakat

kepemimpinan yang dibawa sejak lahir jika tidak dikembangkan dan diterapkan maka dengan sendirinya bakat kepemimpinan yang dimiliki akan hilang. Sebaliknya orang yang tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berdasarkan teori campuran yaitu adanya bakat kepemimpinan yang dibawanya sejak lahir ditambah dengan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengalaman yang cukup, maka akan melahirkan pemimpin yang disenangi oleh masyarakat.

Berdasarkan teori timbulnya kepemimpinan itu maka penulis berpendapat bahwa :

- Kepemimpinan yang berdasarkan teori genetis/keturunan dapat dilihat pada kepemimpinan orang-orang yang memiliki kharismatis
- Kepemimpinan yang berdasarkan teori sosial/pengaruh lingkungan dapat dilihat pada pemimpin militer yang memang dipersiapkan melalui tingkatan tertentu.
- Kepemimpinan yang berdasarkan teori campuran antara teori keturunan dan teori sosial, dapat dijumpai pada sebagian pemimpin dewasa ini.

Setelah melihat dan mempelajari teori-teori yang menjelaskan timbulnya kepemimpinan itu, maka tidak semua teori tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu agar seseorang dapat dipilih sebagai pemimpin dan masyarakat, maka sudah selayaknyalah mempunyai kriteria atau syarat tertentu untuk menjalankan kepemimpinan dalam masyarakat untuk keberhasilan pembangunan.

Dalam konteks ini maka syarat-syarat pemimpin adalah sebagai berikut :

“Syarat-syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah :

- a. Watak yang baik (karakter, budi, moral)
- b. Memiliki sifat-sifat yang menonjol
- c. Membimbing dirinya dengan azas-azas dan prinsip-prinsip kepemimpinan.
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan Perintah-perintah dengan penuh tanggung jawab (correct) serta mampu membimbing anak ubahnya dengan baik dan menggablengnya menjadi satu kesatuan yang efektif.
- e. Mengenal anak ubahnya, memahami sepenuhnya sifat dan tingkah laku masing-masing dalam kesuaşanaan dan pengaruh.
- f. Faham akan cara sebagaimana seharusnya mengukur dan menilai kepemimpinannya”. (Soewarni Handyaningrat, 1982 : 70)

Dikatakan seorang pemimpin harus cerdas, bermoral (berbudi luhur) dan siap dari segala-segalanya masalah, baik yang

sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Disamping itu segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mampu membimbing dan mengenal anak ubahnya dalam berbagai keadaan dan pengaruh.

Syarat-syarat kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal yang penting yaitu :

1. Kekuasaan adalah kekuatan otoritas dan legalitas yang memberikan kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
2. Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan kecakapan kekuatan keterampilan tehnik maupun sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa. (Kartini Kartono, 1982 : 31)

Dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan, sebab jika syarat tersebut telah dimiliki maka dengan sendirinya pemimpin dapat mempengaruhi, dan menggerakkan serta mengatur orang lain atau bawahan sehingga ia bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dari pendapat tersebut di atas tentang syarat-syarat kepemimpinan yang dilakukan

oleh seorang pemimpin, maka penulis berpendapat bahwa kepemimpinan itu harus bersumber atau dipilih karena :

- a. Memiliki pendidikan yang lebih tinggi sehingga mempunyai pandangan yang luas.
- b. Memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi baik terhadap masyarakat maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memiliki kelebihan disbanding dengan orang lain.
- d. Bersifat adil dalam arti tidak membeda-bedakan orang yang dipimpin antara satu dengan yang lain.
- e. Mengerti teknik-teknik komunikasi sehingga dapat menyampaikan pesannya dengan bahasa yang sudah dimengerti.

Dalam hubungan ini, maka John Franch dan Bertram mengemukakan suatu kerangka kekuatan yang berhubungan dengan pengaruh kepemimpinan yaitu :

1. Kekuatan coersive power
2. Kekuatan via pemberian penghargaan (reward power)
3. Kekuatan karena adanya pengesahan (legitimate power)
4. Kekuatan arena penyamaan diri dengan orang-orang yang dikagumi". (Kartini Kartono, 1982 : 122)

ad.1. Kekuatan coersive power, dalam hal ini pemimpin yang bersangkutan mengandalkan diri pada kekauasaannya untuk memaksakan keinginannya kepada para pengikut-Nya.

Misalnya dengan jalan mengancam, sanksi-sanksi apabila para pengikut-Nya tidak menyetujui tindakan-tindakan pemimpin atau menentang instruksi atasannya.

- ad.2. Kekuasaan via pemberian penghargaan (reward power) para pengikut yang bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan keinginan pemimpinnya, diberi penghargaan dalam wujud material atau non material tertentu.
- ad.3. Kekuatan karena adanya pengesahan (legitimate power) kekuatan ini diperoleh melalui posisi "Supervisor" di dalam organisasi yang bersangkutan legitimasi atau pengesahannya disebabkan oleh posisinya yang sah.
- ad.4. Kekuatan oleh pemilikan sesuatu keahlian (ekspert power) kekuatan ini muncul karena pemimpin memiliki keterampilan teknis dan sosial, pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus.
- ad.5. kekuatan karena penyamaan diri dengan orang yang dikagumi, kekuatan ini didasarkan atas identifikasi atau penyamaan diri dari pengikut terhadap pemimpin yang dikagumi dan dihargainya.

Ketiga macam kekuatan yang disebutkan paling dahulu merupakan kekuatan yang dikaitkan dengan kekuatan organisatoris. Sedangkan kedua macam kekuatan yang terakhir dikaitkan dengan faktor-faktor individual.

Kepemimpinan itu menghendaki adanya sifat-sifat kelebihan tertentu, seperti yang dikemukakan oleh John D. Millet yang diikuti oleh Bintoro Tjokromidjojo, mengatakan kepemimpinan itu harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Kesehatan yang baik, energi pribadi dan daya tahan fisik
- b. Suatu keyakinan bahwa kegiatannya menuju arah pencapaian tujuan yang baik, ada komitmen pribadi untuk pencapaian tujuan, bahkan kegairahan dan kepercayaan diri tentang hal itu.
- c. Perhatian terhadap orang lain bahkan keprihatin.
- d. Intelegensi yang baik (ini berarti pengetahuan yang tinggi tentang hal-hal yang khusus tetapi good common sense), kemampuan untuk mengumpulkan membahas dan memberikan informasi yang diperlukan serta kemampuan menggunakan pengetahuan.
- e. Integritas, kecenderungan tanggung jawab terhadap kewajibannya.
- f. Kemampuan untuk persuatif, terutama dalam usaha untuk mendapatkan penerimaan dalam keputusan-keputusannya.
- g. Kemampuan menilai
- h. Loyalitas pengabdian terhadap tujuan usaha dan juga kepada orang-orang yang bekerja dengannya serta kesediaan membela terhadap tantangan atau serangan dari luar. (Bintoro Tjokroamijojo, 1986 - 111-112)

2. Partisipasi

Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan dengan partisipasi adalah partisipasi pembangunan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah merupakan suatu kegiatan kemasyarakatan atas dasar kesukarelaan suatu pekerjaan secara gotong royong sebagai manifestasi organisasi-organisasi masyarakat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perencanaan, kemudian melaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan keinginan mereka, dan turut mengawasinya.

Partisipasi adalah merupakan suatu cara untuk memotivasi agar bawahan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan oleh karena peningkatan partisipasi sangat ditentukan oleh segi psikologis dari pada materi, dimana dengan jalan melibatkan orang-orang di dalamnya, maka orang tersebut akan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan kegairahan kerja serta tanggung jawabnya dapat ditingkatkan disamping itu pula menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging)

Peningkatan partisipasi berarti mengikutsertakan semua orang (masyarakat) baik secara langsung maupun secara tidak langsung antara lain dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian karena mereka ikut terlibat di dalam mengambil atau membuat perencanaan, maka mereka akan merasa ikut bertanggung jawab terlaksananya itu semua.

Esensi yang paling penting dalam partisipasi adalah swadaya gotong royong. Dan arti dari pada swadaya masyarakat sebagai berikut :

“Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok (masyarakat) yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan iktiar ke arah penumbuhan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat”.

Sedangkan gotong royong adalah :

“Suatu kegiatan kemasyarakatan yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, dan iklim tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi”.
(Bintoro Tjokroamijoyo, 1986 : 224).

Pada dasarnya gotong-royong tersebut adalah berdasarkan kesukarelaan, saling membantu untuk sesuatu kegiatan yang menyangkut kepentingan sebagian anggota atau kepentingan seluruh anggota masyarakat tertentu. Ikatan kemasyarakatannya adalah ikatan

mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggunakan ketentuan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan dengan cara gotong royong.

Cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan jalan :

- a. Mengikutsertakan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- b. menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan dan perencanaan.
- c. Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan
- d. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan".
(E.C. Alex, S.Nitisemito, 1982 : 261)

Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan, itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :

- a. Partisipasi dalam efektifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
- b. Partisipasi sebagai individu di luar aktifitas-aktifitas bersama dalam pembangunan.

Dalam tipe partisipasi yang pertama, rakyat diajak dipersuasi, diperintahkan wakil-wakil dari aneka Departemen atau pamong desa,

untuk berpartisipasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, dengan jalan menyumbangkan tenaganya atau hartanya terutama pada pembangunan yang biasanya bersifat fisik.

Dalam tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek aktifitas yang khusus, tetapi ada proyek-proyek pembangunan yang sifatnya tidak memerlukan partisipasi rakyat atau Perintah/paksaan dari atasannya, tetapi selalu atas dasar kemauan sendiri, Contohnya dalam partisipasi Bimas, menjadi akseptor KB, menabung uang Tabanas dan sebagainya.

Selanjutnya kalau apa yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah sistim kerja bakti, maka malahan besar kemungkinan menunjang pembangunan. Hanya saja soalnya adalah bahwa sistim itu tidak sesuai lagi dengan mengeksploitasi tenaga murah rakyat menjadi berbau feodal dan kolonial. Lain halnya kalau rakyat mengerjakan suatu proyek berdasarkan gotong-royong dengan rasa rela karena yakin bahwa proyek itu dimanfaatkan oleh mereka. Barulah mereka akan melaksanakan kerja bakti dengan sungguh-sungguh dan bukan kerja rodi.

Partisipasi dalam swadaya gotong-royong dapat berupa tenaga, barang, uang, dan skill/pikiran dan sebagainya.

C. Peranan Kepala Kelurahan Dalam Pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah bahwa perhatian yang sebesar-besarnya ada atau perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan/Kelurahan. Salah satu faktor yang paling berperan dalam pembangunan ini adalah kepemimpinan Kepala Kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu setelah dikemukakan pengertian kepemimpinan tentang peranan Kepala Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan Desa/Kelurahan agar dapat mencapai hasil dengan baik.

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa :

“ Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan Penanggung jawab utama dalam pemerintahan dan pembangunan, kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan Pasal 24 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/walikota Kepala Daerah tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Undang-Undang No. 5 tahun 1979).

Dengan membaca pasal-pasal tersebut di atas, bahwa Kepala Kelurahan adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab utama

disegala bidang seperti pembangunan desa/Kelurahan, dan Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/Walikota atas nama Gubernur.

Berdasarkan pengertian tersebut, akhirnya penulis berpendapat bahwa Kepala Kelurahan adalah pemimpin yang telah dipercayakan dan diberi wewenang oleh pemerintah agar dapat menyusun dan membangun desa/kelurahannya dengan jalan membimbing, motivasi, mempengaruhi dan mengarahkan tingkat laku warganya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan Desa/Kelurahan tersebut.

Mengingat demikian beratnya tugas dari pada Kepala Kelurahan sebagai penyelenggara dan tanggung jawab di Kelurahan, maka untuk memegang jabatan tersebut disamping sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka ia harus pula memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1979 tentang persyaratan menjadi Kepala Kelurahan sebagai Kepala Pemerintahan yang tertinggi di tingkat desa/Kelurahan.

Syarat-syarat yang dimaksud dengan peraturan-peraturan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa
- d. Tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. Tidak sedang menjalankan Pidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak Pidana yang dikenakan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa/Kelurahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- j. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun. (Kep. Mendagri No. 5 : 1979).

Kelurahan merupakan basis terendah dalam struktur organisasi Pemerintahan Indonesia. Jadi praktis kalau Kepala Kelurahan merupakan pemimpin yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat Desa/Kelurahan harus diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Kelurahan selaku pucuk Pimpinan tingkat Kelurahan/Desa.

Bertitik tolak pada uraian tersebut maka Kepala Kelurahan selaku Pimpinan pemerintahan dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia, maka senantiasa memiliki sifat-sifat pribadi sebagai berikut :

1. Konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, dengan berpedoman P4 yang memuat 36 butir. Sifat konsisten dan konsekuen berarti dalam bagaimanapun keadaannya ia tetap pada pendiriannya tersebut dan siap menerima resiko dari Pendirian tersebut.
2. Mengayomi, yaitu sifat suka memberi perlindungan atau memberi teduh, sehingga pengikutnya selalu merasa aman dan tentram dalam perlindungannya. Suka mengayomi ini pada dasarnya mengandung rasa tanggung jawab yakni kesediaan menanggung segala akibat dan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang dijalankan oleh para pengikutnya/rakyatnya dalam rangka memenuhi Perintah atau ajakan-ajakan.
3. Penuh prakarsa (inisiatif) yaitu sumber inspirasi dari sumber dinamika yang mampu menggerakkan orang-orang. Seorang prakarsa sebenarnya juga memiliki daya cipta dan kreasi, yaitu kemampuan menemukan cara-cara baru dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat sifat ini sangat penting

mengingat masyarakat Indonesia masih berorientasi ke atas masih agak statis karena terikat pada tradisi dan bahkan sebagian masih menggatungkan diri pada alam sekitarnya. Pemimpin diharapkan mampu mendorong gerak masyarakat dengan contoh-contoh teladan mampu mengadakan perubahan-perubahan dalam pembangunan.

4. Percaya pada diri sendiri yaitu suatu yang menimbulkan keseimbangan jiwa pikiran yang pada akhirnya menimbulkan semangat optimisme dalam rangka mencapai tujuan. Sifat ini besar sekali pengaruhnya kepada rakyatnya dimana terakhir ini mempercayakan segala sesuatunya kepada pemimpin. Kepercayaan kepada diri sendiri tumbuh karena pemimpin itu tahu dan menguasai persoalan yang dihadapi dan mengetahui bagaimana mestinya. Seperti halnya kepemimpinan Kepala Kelurahan, mereka mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul pada Kelurahan.
5. Penuh daya pematik, perlu diketahui bahwa daya pematik tersebut disebabkan karena keaktifan penuh gairah hidup penuh kegembiraan bersifat secara langsung dalam hal berbicara, dan sifat-sifat yang menarik. Sifat ini penting karena masyarakat Indonesia masih mementingkan "siapa" yang bicara dan bukannya "apa" yang dibicarakan.

6. Ulet, yaitu suatu sifat yang tidak mudah putus asa di dalam menghadapi kesulitan, dan selalu mengatasi kesulitan-kesulitan. Sifat ulet ini merupakan sifat tidak mau melepaskan sesuatu kalau belum juga sesuatu itu diselesaikan dan sifat ini ada pada orang-orang yang percaya serta yakin akan tercapainya tujuan yang dikehendaki asal saja ada usaha. Keuletan sangat diperlukan oleh pemimpin-pemimpin Pemerintahan di Indonesia disebabkan karena di masa pembangunan ini dihadapkan berbagai masalah keterbatasan, dimana harapan jauh dari kemampuan yang dimiliki.
7. Mudah mengambil keputusan yang menggambarkan sesuatu ketegasan dan sifat ragu, sehingga segala sesuatu dapat dilaksanakan. Mudah mengambil keputusan ini harus juga diartikan sebagai berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dengan kepemimpinan yang mudah mengambil keputusan, maka masalah-masalah dapat diatasi.
8. Jujur, yaitu sifat suka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Kejujuran merupakan jaminan bahwa pemimpin tidak akan menyimpang dari garis tujuan yang akan dicapai dan tidak mementingkan diri sendiri atau golongannya. Sifat jujur dapat dikaitkan dengan sifat tercapainya, yaitu bahwa

pemimpin dapat dipercaya oleh pengikut bahwa ia tidak menyeleweng. Sifat jujur sangat diperlukan oleh karena pengikut-pengikut banyak yang bersifat polos, sederhana dan terbuka.

9. Berani mawas diri, yaitu sifat melihat dalam diri sendiri dan ke dalam tubuh organisasi untuk melihat kekurangan-kekurangan untuk selanjutnya menutupinya. Kesalahan-kesalahan masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk usaha-usaha perbaikan, sedangkan titik positif dapat dipelihara dan dikembangkan untuk meningkatkan atau penyempurnaan usaha-usaha pencapaian tujuan.
10. Komunikatif, yaitu sifat mudah menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menggunakan cara-cara dan gaya yang mudah diterima. Kepengikutan disini pada umumnya masih tradisional, maka ada baiknya kita dipakai sarana-sarana komunikasi yang berbau tradisional terutama untuk masyarakat pedesaan.

Apabila sifat-sifat yang disebutkan di atas dapat diterapkan oleh Kepala Kelurahan sebagai pemimpin pemerintahan sebagai bisnis terendah pada struktur pemerintahan Republik Indonesia, dimana Kepala Kelurahan langsung berhadapan dengan berbagai kepentingan dan permasalahan kemasyarakatan yang ada, maka sudah barang tentu dapat

berhasil mengarahkan segala potensi pembangunan yang ada tingkat Kelurahan. Sifat-sifat yang disebutkan di atas masih harus ditambah atau disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh pemimpin itu sendiri.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan apa itu pembangunan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang akan dicapai.

“Pembangunan adalah segala usaha baik dari pemerintah maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan rakyat menuju kepada perbaikan hidup masyarakat dalam arti kata jasmani dan rohani (fisik, spiritual).” (Rachman Sumitro, Jakarta : 84).

Selanjutnya dikatakan :

- a. Pembangunan adalah merupakan suatu proses yang dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- b. Pembangunan mengarahkan kepada modernitas-modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan menguasai alam lingkungan dalam usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.” (S. P. Siagian : 3)

Desa / Kelurahan pada hakekatnya adalah sama karena keduanya merupakan suatu wilayah yang ada penduduknya dan didalamnya ada hukum yang harus dipatuhi serta mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Setelah diketahui bahwa desa/Kelurahan merupakan organisasi pemerintah terendah yang langsung di bawah camat, maka hakekat dari pada pembangunan desa itu sendiri.

"Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif itu tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon terjamin." (A. Suryadi 1979 : 1970).

Jadi pembangunan desa adalah proses dari perubahan-perubahan terus menerus dalam menuju kemajuan dan perbaikan seperti yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk meratakan pembangunan sampai menyentuh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

Selanjutnya dikatakan bahwa :

"Pembangunan desa adalah pada hakekatnya meliputi berbagai aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) dilaksanakan oleh berbagai departemen dan lembaga non departemen dengan partisipasi masyarakat perlu diselenggarakan tata cara yang lebih terpadu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

(Propinsi, Kabupaten) Kecamatan dan desa. Keterpaduan pembangunan desa dimaksudkan suatu cara pendekatan yang tepat, hal ini disadari dari karena adanya kaitan fungsional antara nasional dan daerah aspirasi masyarakat yang memerlukan keserasian dan keharmonisan" (Sutjitro, 1979:3).

Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut penulis berkesimpulan bahwa pembangunan desa/Kelurahan merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi swadana dan swakarsa masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan merupakan bagian integrasi dari pembangunan daerah dilaksanakan dalam bimbingan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat. pelaksanaan pembangunan meliputi berbagai aspek, penyusunan program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menggerakkan swadaya masyarakat gotong royong. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan tidak mungkin ditangani oleh camat, mengingat banyaknya masalah yang harus ditangani.

Oleh sebab itu maka pemerintah telah membentuk suatu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tiap desa/kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan. Adapun tugas pokok LKMD dalam membantu pemerintah desa/kelurahan merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa sebagai berikut :

- a. Merencanakan pembangunan yang berdasarkan atas musyawarah.
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadana gotong royong masyarakat.
- c. Menumbuhkan kondisi masyarakat yang dinamis dan mengembangkan ketahanan di desa/kelurahannya." (Keputusan Presiden R.I., No. 28 1989 : 5).

Berdasarkan tugas pokok lembaga ketahanan masyarakat desa/kelurahan (LKMD) di atas dijelaskan bahwa LKMD berperan aktif dalam pembangunan serta memasukkan sebagian kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadana gotong royong masyarakat desa/kelurahan sebaik-baiknya.

Partisipasi masyarakat juga sangat dituntut dalam pembangunan desa, maka untuk terlaksananya hal ini Kepala desa/kelurahan harus melibatkan semua anggota kelompok dalam rumusan segala rencana yang akan dilaksanakan. Hal ini akan membawa hasil yang baik sebab masyarakat telah merasa ikut terlibat di dalamnya, dengan demikian hasil yang akan dicapai benar-benar diyakini oleh masyarakat. maka ini dikatakan sebagai berikut :

"Masalah- masalah yang terutama dalam pembangunan adalah bagaimana usaha pembangunan itu sendiri rehabilitasi jalan-jalan, jembatan-jembatan prasarana lain perlu dilanjutkan demikian pula peralatan komunikasi serta sarana perhubungan perlu ditambah jumlahnya dan kualitasnya" (S.B. Yudono, 1981 : 11).

Pelaksanaan pembangunan desa maka peranan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Banyak sekali kegiatan pembangunan yang mutlak melibatkan partipan.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Wala-Walaya

Dengan adanya dasar "pemekaran", maka mengingat adanya kepadatan penduduk dan luas wilayah sehingga ini dibagi menjadi 2 kelurahan yaitu : Kelurahan Rappojawa dan Kelurahan Wala-Walaya yang ada dalam wilayah kota Makassar.

Asal mula nama Kelurahan Wala-Walaya digunakan sejak pemerintahan Belanda (VOC) sejak tahun 1940-an yang berasal dari Bahasa Makassar yaitu "Wala-Walaya" yang artinya suatu wilayah yang terbentang luas dan letaknya berbatasan dengan Ujung Pandang Baru Utara dengan struktur organisasi pemerintahan yang dikepalai oleh kepala kelurahan dan dibantu oleh seorang sekretaris (juru tulis) serta kepala urusan lainnya.

Pada tahun 1980, berdasarkan Undang-Undang tahun 1979, tentang pemerintahan desa/kelurahan. Ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 tahun 1980 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan, sehingga dari nama lingkungan berubah nama menjadi kelurahan dalam hal ini ialah "Kelurahan Wala-

Walaya" yang dikepalai oleh seorang lurah, dan dibantu oleh beberapa orang perangkat kelurahan seperti yang terlihat pada pembahasan struktur organisasi kantor Kelurahan Wala-Walaya.

B. Keadaan Geografisnya

Kelurahan Wala-Walaya merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Tallo yang terletak pada bagian Kota Makassar, maka sudah barang tentu keadaan geografisnya sudah tidak ditemukan lagi hutan belukar. Kelurahan Wala-Walaya adalah termasuk daerah kota. Jadi praktis bahwa sebagian daerahnya terutama bagian timur adalah daerah lorong (gang) dan sebelah baratnya kebanyakan kompleks/perumahan. Dan lagi pula di daerah ini masih ada penduduk karena tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, bila terjadi hujan maka banjir melanda dan sampah-sampah bertebaran yang sudah barang tentu berdampak pada kesehatan penduduk atau masalah lain. Dan ini perlu ditangani secara serius, karena Kelurahan Wala-Walaya mempunyai curah hujan rata-rata tiap tahun mencapai 180 hari, sedangkan 30°C dalam tiap tahunnya. Kelurahan Wala-Walaya yang terletak berbatasan dengan Ujung Pandang Baru, dengan luas keseluruhan 18,60 km².

Untuk lebih jelasnya, adapun batas-batas wilayah Kelurahan Wala-Walaya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rappojawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan La'latang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Pandang Baru.

Luas wilayah Kelurahan Wala-Walaya adalahkm, dan ini dapat diperinci berdasarkan lingkungan yang ada dalam wilayah, kelurahan tersebut, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I
LUAS WILAYAH KELURAHAN WALA-WALAYA
BERDASARKAN JUMLAH LINGKUNGAN (KM²)

NO	LINGKUNGAN	LUAS WILAYAH
1	WALA-WALAYA	08,77
2	TURUNGAN	09,83

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo
Kota Makassar Tahun 2001

Tabel pertama di atas, menunjukkan bahwa dari kedua lingkungan yang ada pada wilayah Kelurahan Wala-Walaya pada setiap lingkungan yang ada.

Kelurahan Wala-Walaya terdiri dari :

- a. 2 Lingkungan yaitu :
 1. Lingkungan Wala-Walaya
 2. Lingkungan Turungan
- b. Rukun Warga (RW) terdiri atas 5 buah
- c. Rukun Tetangga (RT) sebanyak 47 buah.

C. Keadaan Demografi

Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, yang mempunyai luas wilayah 8,77 km² berpenduduk sebanyak 7,931 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :

- Laki-laki sebanyak	3,929 orang
- Perempuan sebanyak	4,002 orang
Jumlah Penduduk	7.931 orang

1) Jumlah Penduduk

Dari data yang ada pada kantor Kelurahan Wala-Walaya menunjukkan bahwa Kepala Keluarga (KK) yang ada adalah sebanyak 1,803 KK. Adapun perincian jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2
KEADAAN PENDUDUK MENURUT KOMPOSISI
UMUR TAHUN 2001

NO.	KOMPOSISI UMUR	JUMLAH PENDUDUK
1	0 - 4 Bulan	982 orang
2	5 - 9 Tahun	931 orang
3	10 - 14 Tahun	927 orang
4	15 - 19 Tahun	1.281 orang
5	20 - 24 Tahun	670 orang
6	25 - 29 Tahun	627 orang
7	30 - 34 Tahun	486 orang
8	35 - 39 Tahun	453 orang
9	40 tahun ke atas	1.574 orang
	Jumlah	7.931 orang

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2001

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun semakin cenderung meningkat disebabkan karena bertambahnya jumlah keluarga yang memasuki wilayah Kelurahan Wala-Walaya.

Lebih lanjut dalam dikemukakan mengenai keadaan wilayah Kelurahan Wala-Walaya sebagian besar jumlah penduduknya adalah pedagang wiraswasta, buruh harian, pegawai swasta serta pegawai negeri dan pertukaran/pengrajin hal ini memungkinkan karena Kelurahan Wala-Walaya daerah yang kehidupan sehari-harinya disalurkan dari hasil-hasil kegiatan pekerjaan yang telah bervariasi pula.

TABEL 3

KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO.	KOMPOSISI UMUR	JUMLAH PENDUDUK
1	Pedagang Wiraswasta	662 orang
2	Buruh Harian	655 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	342 orang
4	Pegawai Swasta	417 orang
5	Pensiunan (Pegneg/ABRI)	106 orang
6	Pertukangan / Pengrajin	57 orang
7	A B R I	32 orang
8	Pengusaha	9 orang
J u m l a h		2.280 orang

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo
Kota Makassar Tahun 2001

Melihat tabel tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa konsentrasi pekerjaan penduduk selain pedagang wiraswasta juga tertuju kepada pilihan lain yaitu sebagai buruh, hal ini cukup beralasan karena mengingat wilayah Kelurahan Wala-Walaya sudah menjadi kota.

2) Sosial Budaya

a) Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan di Kelurahan Wala-Walaya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN
DI KELURAHAN WALA-WALAYA

Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
	Sekolah	Guru	Siswa/Murid
1. TK	2	8	100
2. SD Negeri	1	15	470
3. SLTP Negeri	-	-	-
4. SLTP Swasta	1	30	360
5. SMU Negeri	-	-	-
6. SMU Swasta	-	-	-

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2001

Tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan pendidikan dan Kelurahan Wala-Walaya cukup mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta.

TABEL 5
KEADAAN PEMELUK AGAMA
DI KELURAHAN WALA-WALAYA

No.	Agama	Banyaknya Pemeluk
1.	Islam	5.980 orang
2.	Kristen	1.340 orang
3.	Katolik	411 orang
4.	Hindu	170 orang
5.	Budha	30 orang
Jumlah		9.931 orang

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2001

b) Agama

Umumnya penduduk yang ada di Kelurahan Wala-Walaya adalah pemeluk agama Islam dan sebagian adalah Kristen, Hindu, Budha dan Katolik walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Beragamnya pemeluk agama di wilayah ini. Disebabkan karena banyaknya penduduk yang memasuki kelurahan tersebut yang datang dari berbagai suku yang ada di Indonesia.

TABEL 6
JUMLAH SARANA IBADAH
DI KELURAHAN WALA-WALAYA

NO.	SARANA IBADAH	BANYAKNYA
1	Masjid	5 buah
2	Musallah	-
3	Gereja	1 buah
4	Kuil / Pura	-
	J u m l a h	7.931 orang

Sumber data : Kantor Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2001

Untuk kepentingan sarana ibadah, maka kita lihat bawah selain sarana ibadah Islam sarana ibadah lain di Kelurahan Wala-Walaya namun pemeluk agama ada di luar Islam. Olehnya itu kita dapat lihat sebagai berikut :

D. Tugas-Tugas Pokok Pemerintahan Wala-Walaya

1. *Tugas-tugas Pokok Kaur Pembangunan*

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- b. Melakukan kegiatan pembangunan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan.
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan.

- h. Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa.
 - i. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam.
 - j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi masyarakat lainnya.
 - k. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
 - l. Membantu pelaksanaan pungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).
 - m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
2. *Tugas-tugas Pokok Kaur Pemerintahan*
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
 - d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU)
 - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil.
 - i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
 - j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
 - k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintah, ketentraman dan ketertiban.
3. *Tugas-tugas Pokok Sekretaris Lurah :*
- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan.
 - b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi dan perumusan program serta petunjuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan pembinaan kesejahteraan rakyat.

- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kesejahteraan.
 - e. Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.
- 4. Tugas-tugas Pokok Kaur Umum**
- a. Melakukan administrasi kepegawaian
 - b. Melakukan administrasi keuangan
 - c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kelurahan
 - d. Melakukan urusan rumah tangga
 - e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara
 - f. Melakukan urusan tata usaha kelurahan
 - g. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan pemerintah kelurahan.

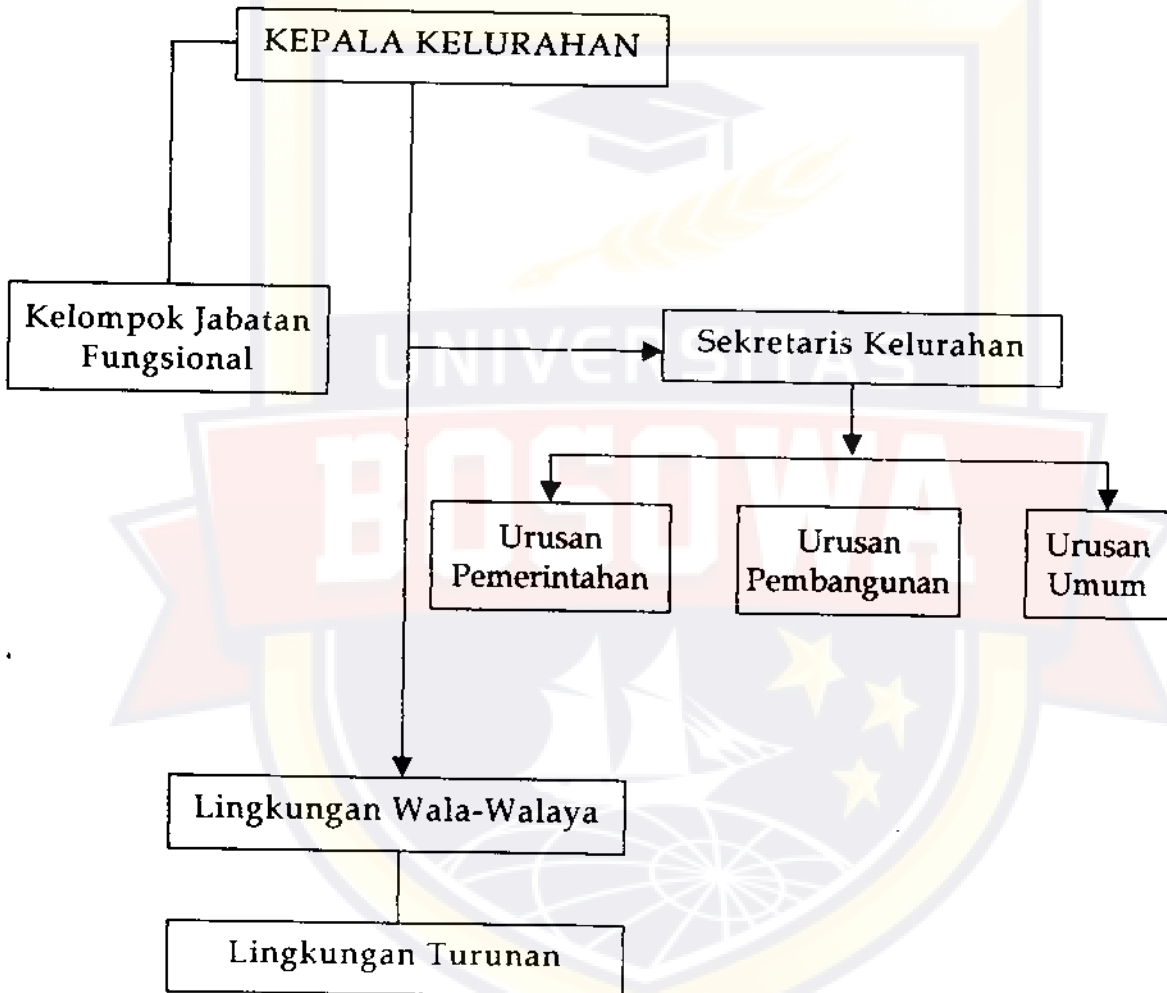
5. *Tugas-tugas Pokok Lurah*

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalanya pemerintahan
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
- c. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Melakukan usaha pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- f. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan kelurahan.

SUSUNAN KARYAWAN DILIHAT DARI TINGKATANNYA
DIKELURAHAN WALA-WALAYA

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	Drs. Tajuddin 580 017 085	Penata Muda (III/a)	Lurah
2	H. Zainuddin. S 580 010 217	Pengatur Tk. I	Sekretaris
3		Pengatur (II/c)	Kaur Pemerintahan
4	Djabbar 010 179 091	Pengatur Tk. I (II/c)	Kaur Umum
5	Amiruddin Made 580 021 046	Pengatur (II/c)	Kaur Pembangunan
6	Muh. Syahril	PHK	Staf
7	Taufik Goslim	Sukarela	Staf
8	Amrullah	Sukarela	Staf

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN WALA-WALAYA
TAHUN 2001



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepala Kelurahan Wala-Walaya Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Sudah menjadi kenyataan bahwa keberhasilan seorang Kepala Kelurahan dimana ia mampu berperan sebagai penggerak dalam usaha-usaha pembangunan, disamping itu tidak kalah pentingnya adalah dukungan yang diberikan oleh masyarakat di dalam proses pembangunan.

Peranan Kepala Kelurahan berbagai upaya-upaya pembangunan maka harus terpikirkan lebih dahulu adalah apakah program itu mendapat dukungan dari masyarakat, dan kalau tidak mendapat dukungan ialah bagaimana untuk mempengaruhi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam upaya menjabarkan program-program pemerintah agar mampu dapat diterima oleh masyarakat, jalan satu-satunya adalah kepeloporan Kepala Kelurahan dalam rangka memperkenalkan serta memasyarakatkan usaha-usaha pembaharuan beserta pembangunan yang telah direncanakan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Kelurahan Wala-Walaya tentang bagaimana melaksanakan pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya meliputi berbagai prasarana sosial prasarana transportasi, maka kepala Kelurahan

TABEL 7

**Tanggapan Responden Tentang Cara Pendekatan Kepala
Kelurahan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat**

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Demokratis	50	100
2. Otoritas	-	-
3. Liberal	-	-
J u m l a h	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 50 responden yang diteliti maka kepemimpinan yang sifatnya pendekatan Demokratis adalah sebanyak 50 orang (100%) dan melalui pendekatan Demokratis dapat dilihat dan kewibawaan, kekuasaan dan kemampuan sehingga dalam menggerakkan dan mengatur orang lain dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sedangkan yang memberikan penilaian kepemimpinan Otoritas tidak ada karena tidak digunakan tipe cara tersebut begitu pula kepemimpinan Liberal mereka menjawab tidak ada.

TABEL 8

**Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Kelurahan
Sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Aktif	50	100
2. Kurang Aktif	-	-
3. Tidak Aktif	-	-
Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Penelitian Laporan tahun 2001

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa peranan Kepala Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan adalah aktif. Hal ini terbukti dari jawaban responden tentang keikutsertaannya di dalam pelaksanaan pembangunan, dari jawaban responden sebanyak 50 orang semuanya mengatakan Kepala Kelurahan aktif dalam memberikan partisipasi kepada masyarakat.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang membenarkan tentang adanya peranan Kepala Kelurahan berupa sikap yang ditunjukkan adalah aktif dalam memberikan ide-ide, menanamkan pengertian kepada segenap masyarakat maka dapatlah menimbulkan partisipasi secara aktif.

Kepemimpinan Kepala Kelurahan yang demokratis dalam kedudukannya sebagai administrator dalam pembangunan telah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini telah terbukti bahwa kepemimpinan Kepala Kelurahan Wala-Walaya dapat memperlancar pelaksanaan program dan senantiasa mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan dan menetapkan setiap program pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan kekuatan yang sangat berarti dan diperlukan dalam memperlancar laju pembangunan sekaligus mencerminkan dan membawa aspirasi masyarakat dan jiwa demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini terwujud berkat kepemimpinan Kepala Kelurahan dan dukungan dari setiap aparat serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan pengarahan-pengarahan yang senantiasa diberikan kepada masyarakat Kelurahan Wala-Walaya sebab melalui jalan itulah merupakan jaminan bagi proses adaptasi diri masyarakat terhadap pembangunan.

Untuk itulah diperlukan aparat yang mempunyai jiwa Kepemimpinan yang arif dan bijaksana dan sesuai dengan situasi Kelurahan dimana ia bertugas, kemampuan adaptasi dan komunikatif dengan masyarakat sangat penting.

B. Hasil-hasil Pemanfaatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sangat tergantung pada usaha-usaha mengikut sertakan masyarakat, sebab kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha pembangunan itu sangat terbatas.

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah setempat dan masyarakat dimana pelaksanaan tersebut. diperlukan pemikiran yang tajam dan jauh tentang cara-cara untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat Kelurahan Wala-Walaya selain faktor intern menyangkut kepentingan desa/kelurahan dan masyarakat Kelurahan itu sendiri, maka faktor ekstern atau kepentingan umum yang lebih luas perlu juga diberikan perhatian utama dalam menciptakan strategi pembangunan sesuatu desa atau Kelurahan, guna memperlancar faktor-faktor pendorong dan sekaligus mengurangi atau menghilangkan faktor penghambatnya. sebagaimana akan dirumuskan pada uraian berikut.

Untuk lebih jelasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 9

**Tanggapan Responden Tentang Masyarakat yang
Berpartisipasi dalam Pembangunan Lingkungan**

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Sangat Tinggi	16	38
2. Cukup Tinggi	25	50
3. Rendah	9	12
Jumlah	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan menurut responden yang diteliti yang mengatakan sangat tinggi sebanyak 16 orang (38%).

Sebagaimana telah diketahui bahwa hakekatnya pembangunan merupakan proses perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang akan dicapai jadi dengan memahaminya hakekat tersebut maka masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan lingkungan merupakan sesuatu hal kemajuan bagi kita yaitu masyarakat itu sendiri, sedangkan yang menyatakan cukup tinggi sebanyak 25 orang (50%) karena pada umumnya masyarakat telah mengetahui apa arti dari pembangunan lingkungan maka dari itu dengan secara tidak langsung tanpa paksaan mereka dengan sukarela turut serta berpartisipasi. Dan yang menyatakan rendah sebanyak 9 orang (12%) karena

masih ada masyarakat belum menyadari arti pentingnya pembangunan lingkungan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena suatu usaha yang dilakukan itu harus melibatkan masyarakat, dimana yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari peranan seorang Kepala Kelurahan dalam kepeloporannya dalam pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu mendukung partisipasi masyarakat.

Disamping itu sesuatu yang tidak boleh dilupakan adalah petunjuk pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan seperti yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka desa/kelurahan dimutlakan untuk mengolah, membangun, serta memanfaatkan hasil-hail pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat partisipasi masyarakat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 10
Tanggapan Responden Tentang Masyarakat yang
Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jalan

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Dengan Tenaga	30	60
2. Dengan Dana Uang	20	40
3. Tenaga Pengganti	-	-
Jumlah	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalananan yaitu dengan tenaga sebanyak 30 orang (60%) partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan dapat digerakan dalam swadaya gotong oyong dengan berupa tenaga/fisik, dengan dana/uang sebanyak 20 orang (40%), dalam rangka pencapaian tujuan serta menunjang keberhasilan suatu kegiatan ini, tentunya didasarkan atas kesukarelaan, saling membantu untuk suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri, sedangkan yang mengatakan tenaga pengganti tidak ada.

Telah disadari bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara terpadu, keterpaduan ini dilakukan sejak dari perencanaan sampai pelaksanaannya maka perlu ada konsep yang mantap dan terpadu di bidang pembangunan kelurahan tersebut, yang dapat disusun dari atas berdasarkan usulan dari bawah. Dan hal ini harus mendassarkan prioritas kebutuhan yang dirasakan dan bersifat mendesak seperti halnya pembanguna jalananan, masjid dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat Kepala Keluarga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan jalananan.

TABEL 11
Tanggapan Responden Tentang Kepala Keluarga yang
Berpartisipasi dalam Pembangunan Masjid

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Semua ikut	15	30
2. Sebagian besar ikut	30	60
3. Sebagian kecil ikut	5	10
Jumlah	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid menurut responden yang diteliti yang mengatakan semua ikut 15 orang (30%). Jadi, kepala keluarga yang berpartisipasi ini dilihat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan masjid mengingat kepentingan sarana ibadah mencerminkan ketakwaan kita kepada Tuhan, sedangkan sebagian besar kepala keluarga ada 30 orang (60%), telah diketahui bahwa khususnya di Kelurahan Wala-Walaya pemeluk agama beraneka ragam maka dari itu hanya sebagian besar kepala keluarga ikut dalam pembangunan masjid, dan mengatakan sebagian kecil ikut sebanyak 5 orang kepala keluarga (10%) hal ini dapat diketahui bahwa masih ada yang malas ikut

dalam kegiatan tersebut, walaupun demikian bahwa peran atau partisipasi kepala keluarga dalam pembangunan masjid masih besar.

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah suatu usaha pendayagunaan segala sumber dan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terkandung dalam masyarakat yang berdasarkan atas kemampuan masyarakat tersebut. Sumber daya yang meliputi dana dan tenaga manusia tersebut diproses yang diserahkan kepada pelaksanaan masyarakat itu sendiri. Dan salah satu contoh partisipasi masyarakat dilihat dari segi pemanfaatan hasil pembangunan di kelurahan adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 12
Tanggapan Responden Tentang Kegairahan Masyarakat
dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Sangat Bergairah	25	50
2. Cukup Bergairah	25	50
3. Tidak Bergairah	-	-
Jumlah	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Melihat tabel di atas yang mengatakan sangat bergairah 25 orang (50%) kehidupan sehari-hari khususnya manfaat hasil pembangunan merupakan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Cukup bergairah 25 orang (50%) hanya sebagian saja orang yang merasakan hasil pembangunan tentunya yang mengetahui apa arti pembanguna itu sendiri sedangkan yang tidak bergairah tidak ada. Pada dasarnya semua masyarakat telah mengetahui manfaat pembangunan itu sendiri.

C. Faktor Penunjang dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Faktor Penunjang

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam kelurahan itu sendiri, yang mendorong memperlancar gerak usaha swadaya gotong royong masyarakat kelurahan yang bersangkutan antara lain :

1. Kepemimpinan yang positif, berpandang ke depan yang konkrit dan bertanggung jawab.
2. Pengarahan dan bimbingan yang konkrit baik dari pemerintah kelurahan maupun dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah.
3. Bantuan yang memadai dan tidak mengikat yang betul-betul sangat diperlukan dan dibutuhkan.

4. Kesadaran sosial dari masyarakat desa itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dan bergotong royong.
5. Pengorganisasian yang terarah dan rapi demi efisiensi dan efektifitas kerja sama masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
6. Penghargaan yang diberikan kepada desa/kelurahan itu yang aktif dalam membangun desanya/kelurahannya.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar kelurahan yang ikut memperlancar usaha-usaha swadaya dan gotong royong antara lain :

1. Letak geografis desa/kelurahan yang dapat memanfaatkan hubungan dan komunikasi yang lancar.
2. Pengaruh dan komunikasi yang serasi dan konkrit dari pemerintah.
3. Bantuan yang wajar dan sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga badan swasta lainnya.
4. Kompetisi yang sehat dan positif dengan desa-desa/kelurahan dalam gerakan pembangunan desa/kelurahan.

Dan lebih konkritnya faktor pendukung dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

TABEL 13

**Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang Menunjang Lajunya
Pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya**

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Kepemimpinan Kepala Kelurahan yang Positif.	20	40
2. Pengarahan dan Bimbingan LKMD	15	30
3. Tidak Bergairah	15	30
Jumlah	50	100

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2001

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan kepemimpinan Kepala Kelurahan yang positif sebanyak 20 orang (40%) dimana peran lurah sebagai pemimpin yang positif besar pengaruhnya dalam mempengaruhi, mendorong dan mengajak orang-orang agar perbuatannya dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang mengatakan pengarahan dan bimbingan LKMD ada 15 orang (30%) perlunya membentuk suatu Lembaga Ketahanan Masyarakat menggambarkan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang mempunyai tugas sebagai pelaksana pembangunan, sedangkan yang tidak bergairah ada 15 orang (30%) masih ada sebagian masyarakat kurang mempunyai minat dalam membantu lajunya arah pembanguna khususnya di Kelurahan Wala-Walaya.

Dari tabel di atas nampak bahwa faktor-faktor yang menunjang pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya adalah kepemimpinan Kepala Kelurahan yang positif, pengarahan dan bimbingan LKMD dan kesadaran masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Intern

Faktor Intern adalah faktor yang ada di dalam desa/kelurahan itu sendiri yang bisa menghambat kelancaran jalannya pembangunan antara lain :

1. Sikap, adat istiadat kolot yang enggan menerima usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran baru.
2. Fasilitas, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang.
3. Komunikasi dan hubungan yang masih sangat terbatas dengan daerah luar secara geografis.
4. Pimpinan desa/kelurahan yang kurang cakap, tidak mampu dan tidak jujur dalam memimpin masyarakat di kelurahannya.
5. Letak geografisnya masih tidak mendukung karena kurangnya kesadaran masyarakat.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar desa/kelurahan yang bisa menghambat usaha swadaya dan gotong royong antara lain :

1. Usaha dari pamong desa/kelurahan yang ingin menjadikan desa/kelurahan obyek untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Untuk komersialisasi jabatan, yang mengeksploitasi usaha pelayanan kepada masyarakat (mau dilayani oleh masyarakat).
3. Hasil produksi usaha masyarakat yang tidak dapat dipasarkan, karena belum ada sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Struktur organisasi dan prosedur pembinaan dan pengembangan desa/kelurahan masih belum begitu mantap.
5. Bantuan pembangunan desa yang masih kurang dan sering dikurangi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Lebih jelasnya faktor penghambat di Kelurahan Wala-walaya dapat kita lihat tabel berikut ini :

TABEL 14

Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang menghambat Lajunya Pembangunan di Kelurahan Wala-walaya

Jawaban	Frekuensi	(%)
1. Bantuan pembangunan desa kelurahan yang tidak mencukupi	20	27,5
2. Sarana/Prasarana	10	25
3. Kesadaran Masyarakat	20	57,5
Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Penelitian Laporan tahun 2001

Dari tabel di atas nampak faktor-faktor yang menghambat jalannya pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya menurut responden yaitu bantuan pembangunan desa/kelurahan yang tidak mencukupi sebanyak 20 orang (37,5%), sarana dan prasarana 30 orang (25%) dan kesadaran masyarakat sebanyak 20 orang atau (37,5%).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan Wala-walaya dalam peranannya sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup berhasil karena pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan demokratis, mampu menyukseskan pembangunan dengan menggerakkan masyarakat.
2. Dengan keberhasilan yang telah dicapai ternyata masih ada hambatan yang dihadapi Kepala Kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat antara lain : Bantuan pembangunan desa/kelurahan yang masih tidak mencukupi dan kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat di kelurahan itu.
3. Demikian menurut kenyataan Kepala Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Wala-walaya belum merasa puas hasil pembangunan yang telah dicapai, olehnya itu masih banyak kebutuhan masyarakat yang laib perlu direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

B. Saran-Saran

1. Berperannya Kepala Kelurahan Wala-Walaya dalam usaha pendekatan demokratis maka partisipasi masyarakat Kelurahan Wala-Walaya harus tetap digalang dan dikembangkan demi suksesnya pembangunan yang dilaksanakan.
2. Berhasilnya pembangunan di Kelurahan Wala-Walaya yang ditunjang oleh partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil pembanguana yang memuaskan.
3. Untuk mengatasi masalah yang ada, seperti kurangnya banuan pembangunan desa kelurahan sarana dan prasarana maka Kepala Kelurahan Wala-Walaya harus mengusahakan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Kelurahan Wala-Walaya agar dapat lebih meningkatkan pembangunan di kelurahannya.
4. Sesuai kenyataan yan ada bahwa sebagian besar pembangunan hanya mampu berjalan dengan baik adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah seperti perbaikan jalan, rehabilitasi sekolah dan lain-lain. Olehnya itu maka dapat dikatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pembanguan desa kelurahan maka jalur pemecahannya adalah sumber-sumber pendapatan kelurahan Wala-Walaya harus digali dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

5. Disamping itu Kepala Kelurahan agar berusaha keras sebab sikap mental masyarakat dengan jalan memberikan penerangan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang belum mengerti tentang pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Kartini Kartono, 1988. Pemimpin dan Kepemimpinan
- Karyadi. M, 1981. Kepemimpinan (Leadership), Bogor : Politea.
- Nitisemitor, E.C. Alex. S, 1982. Manajemen Personalia, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suryadi A, 1979. Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni Bandung.
- Siagian, S.P, 1985. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono, 1970. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : UI.
- Soerwarno. Handayaniingrat, 1982. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung.
- Sotjitro, 1970. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta ; UI.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (Penyunting), 1981, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES.
- Suryobrata, Sumadi, 1983. Metodologi Penelitian, Yogyakarta ; Rajawali Pers.
- Subagyo P, Joko. SH, 1991. Metode Penelitian Dalam teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjokromidjojo Bintoro, 1986. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, LP3ES.
- Yudono. S.B., 1981. Partisipasi Dalam Proses Pembangunan Nasional No. 4. Prisma.

DOKUMEN-DOKUMEN

Kepres RI. No. 22, 1980. Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

SK. Mendagri No. 42. Tahun 1969. Tentang Pembangunan Masyarakat Desa Menurut Catatan Resmi Pola Gerak Operasional Pembangunan Desa.

Undang-Undang Dasar 1945. Bahan Penataran P4, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 5, 1979. Tentang Pemerintahan Desa Semarang : CV. Rineka Cipta.

